

Pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Sumatera

Ahmad Fajri

Mahasiswa Prodi Ekonomi Pembangunan Fak. Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: 1) perkembangan belanja modal provinsi-provinsi di Sumatera; 2) pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Sumatera. Hasil penelitian menemukan bahwa laju perkembangan belanja modal tertinggi diperoleh Provinsi Lampung sebesar 41%, diikuti oleh Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bangka Belitung masing-masing sebesar 18%. Sedangkan perkembangan belanja modal terendah diperoleh Provinsi Aceh sebesar -4%. Belanja modal tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Sumatera. Ini menunjukkan masih kurang tepatnya kebijakan pengalokasian belanja modal sehingga tidak mampu mendorong peningkatan permintaan produksi daerah.

Kata Kunci : Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, Produksi Daerah

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran dari adanya pembangunan ekonomi disuatu daerah oleh karena itu pemerintah selalu mengupayakan agar pertumbuhan ekonomi selalu meningkat dari tahun ke tahun yang nantinya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Boediono (1999) Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai suatu proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Hal ini berarti, bahwa dalam jangka panjang, kesejahteraan tercermin pada peningkatan output perkapita yang sekaligus memberikan banyak alternatif pada masyarakat dalam mengkonsumsi barang dan jasa, serta diikuti oleh daya beli masyarakat yang semakin meningkat.

Dalam perekonomian Indonesia, Pulau Sumatera memegang peranan penting karena dari tahun ke tahun Provinsi-Provinsi yang ada di Sumatera memberikan kontribusi besar kedua setelah Pulau Jawa terhadap total Domestik Regional Bruto (PDRB) Nasional. Laju Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera selalu meningkat. Jika pada tahun 2009 laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4.72 meningkat menjadi 5.70 pada tahun 2013. Peningkatan tersebut seiring dengan perkembangan perekonomian di Provinsi yang ada di Sumatera yang mana laju pertumbuhan ekonomi di masing-masing Provinsi di Sumatera juga meningkat. Upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi diantaranya melalui kebijakan pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang akan mendorong peningkatan permintaan produksi dalam perekonomian. Studi empiris hubungan antara pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan hasil yang berbeda, hal ini terungkap dari

penelitian Purbadharmaja (2006) dan Sodik (2007) yang menunjukkan pengeluaran pemerintah memberi kontribusi nyata dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi

Bentuk pengeluaran pemerintah berupa alokasi belanja modal untuk penyediaan berbagai sarana dan prasarana fasilitas publik yang dapat menjadi aset tetap daerah dan mempunyai nilai manfaat lebih satu tahun diharapkan dapat menjadi modal penunjang terlaksananya berbagai aktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu Permasalahan pengeluaran pemerintah khususnya belanja modal sampai saat ini belum mendapat perhatian yang serius dari pemerintah baik di pusat maupun di daerah sehingga ke depan hendaknya lebih intensif diperhatikan dan diprioritaskan, karena pada kenyataannya selama ini anggaran pemerintah baik APBN maupun APBD lebih besar porsinya untuk belanja pegawai dari pada belanja modal. Hal tersebut mengakibatkan pembangunan di daerah belum terlihat berdampak signifikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan masih minimnya kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: 1) perkembangan belanja modal pemerintah provinsi-provinsi di Sumatera; 2) pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Sumatera.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengeluaran pemerintah

Menurut Musgrave dan Rostow, perkembangan pengeluaran negara sejalan dengan tahap perkembangan ekonomi dari suatu negara. Tahap-tahap pembangunan ini dapat dibedakan yaitu Pada tahap awal perkembangan ekonomi diperlukan pengeluaran negara yang besar untuk investasi pemerintah, Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi tetap diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi dan Pada tahap lanjut pembangunan ekonomi, pengeluaran pemerintah tetap diperlukan

Menurut Musgrave pada suatu proses pembangunan investasi total terhadap pendapatan nasional semakin besar, akan tetapi rasio investasi pemerintah terhadap pendapatan nasional akan mengecil. Sementara itu Rostow berpendapat bahwa pada tahap lanjut pembangunan terjadi peralihan aktivitas pemerintah, dari penyedia prasarana ekonomi ke pengeluaran-pengeluaran untuk layanan sosial seperti kesehatan dan pendidikan.

Hukum Wagner mengatakan pendapatnya dalam bentuk suatu hukum, yang menyebutkan bahwa pengeluaran pemerintah akan meningkat sejalan dengan peningkatan perekonomian suatu negara. Dimana adanya korelasi positif antara pengeluaran pemerintah dengan tingkat pendapatan nasional. Formulasi hukum Wagner mendasarkan pandangannya pada suatu teori yang disebut *organic theory of statae* yaitu teori yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak. Menurut Wagner ada lima hal yang menyebabkan pengeluaran pemerintah selalau meningkat yaitu: 1) Tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan; 2) Kenaikan tingkat pendapatan masyarakat; 3) Urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi; 4) Perkembangan demografi; 5) Ketidakefisienan birokrasi

Teori Peacock dan Wiseman didasarkan pada pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Dimana perkembangan ekonomi menyebabkan pungutan pajak meningkat, meskipun tarif pajaknya mungkin tidak berubah, yang pada gilirannya mengakibatkan pengeluaran pemerintah meningkat pula.

Pengeluaran pemerintah merupakan alokasi anggaran yang disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya ke berbagai sektor atau bidang dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat melalui bermacam – macam program. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pengeluaran pemerintah Indonesia secara garis besar dikelompokkan ke dalam dua golongan: 1) Pengeluaran Rutin; 2) Pengeluaran Pembangunan

Belanja modal

Belanja Modal merupakan salah satu jenis Belanja Langsung dalam APBN/APBD. Belanja Modal merupakan salah satu jenis Belanja Langsung dalam APBN/APBD. Menurut Erlinadan Rasdianto (2013) Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Besaran nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset (Permendagri 13 Tahun 2006). Dalam Lampiran III PMK No. 101/PMK.02/2011 Belanja Modal dipergunakan untuk antara lain: Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan bangunan, Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan, Belanja Modal lainnya, dan Belanja Modal Badan Layanan Umum (BLU). Secara spesifik sumber pendanaan untuk Belanja Modal belum ditentukan aturannya. Namun seluruh jenis sumber-sumber penerimaan daerah dapat dialokasikan untuk mendanai Belanja Daerah diantaranya Belanja Modal. Sumber-sumber penerimaan daerah (UU Nomor 33 Tahun 2004) yang dapat digunakan sebagai sumber pendanaan Belanja Daerah berasal dari Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau Gross National Produk (GNP) tanpa melihat apakah kenaikan PDRB atau GNP tersebut lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk dan perubahan struktur ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi menurut Boediono (1999). bisa didefinisikan sebagai penjelasan mengenai faktor-faktor apa yang menentukan kenaikan output perkapita dalam jangka panjang, dan penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut sehingga terjadi proses pertumbuhan.

Menurut Schumpeter dan Hicks dalam Jhingan (2002), ada perbedaan dalam istilah perkembangan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Perkembangan ekonomi merupakan perubahan spontan dan terputus-putus dalam keadaan stasioner yang senantiasa mengubah dan mengganti situasi keseimbangan yang ada sebelumnya, sedangkan pertumbuhan ekonomi adalah perubahan jangka panjang secara perlahan dan mantap yang terjadi melalui kenaikan tabungan dan penduduk. Hicks mengemukakan masalah negara terbelakang menyangkut pengembangan sumber-sumber yang tidak atau belum dipergunakan, kendati penggunaannya telah cukup dikenal. Sedangkan menurut Simon Kuznet dalam Jhingan (2003), pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara (daerah) untuk menyediakan semakin banyak barang-barang ekonomi kepada penduduknya

Terdapat empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yakni penduduk, tenaga kerja, akumulasi modal dan teknologi. Dari beberapa faktor tersebut, modal merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hal ini sesuai dengan teori pertumbuhan ekonomi Neo-Klasik. Menurut pandangan ekonom Neo-Klasik pertumbuhan ekonomi tergantung kepada penambahan

penyediaan faktor-faktor produksi penduduk, tenaga kerja, akumulasi modal dan tingkat kemajuan teknologi. Demikian pula yang terjadi dengan pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh alokasi belanja modal yang dianggarkan oleh pemerintah daerah. Semakin besar dana yang dianggarkan oleh pemerintah daerah seharusnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

METODE

Jenis dan sumber data

Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berdasarkan rentang waktu (*time series*) selama 5 tahun yakni dari tahun 2009-2013 yang meliputi data belanja modal, pertumbuhan ekonomi menurut provinsi-provinsi se-Sumatera. Data bersumber dari berbagai institusi pemerintah terutama, Direktorat Jenderal Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah Republik Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Informasi lain bersumber dari studi kepustakaan berupa jurnal ilmiah dan buku-buku teks dari berbagai publikasi.

Alat analisis data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari metode deskriptif dan metode kuantitatif. Metode deskriptif untuk menganalisis perkembangan belanja modal dan metode kuantitatif menggunakan regresi data panel untuk menganalisis pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi.

Terdapat tiga jenis cara untuk mengestimasi parameter model dengan data panel yaitu metode Common effect, metode Fixed Effect dan metode Random Effect. Dalam penelitian ini menggunakan metode Fixed Effect dengan alasan untuk menghindari perubahan intersep pada data silang tempat dan runtut waktu seperti yang terjadi pada metode Pooled Least Square. Dengan cara memasukkan peubah dummy untuk memungkinkan intersep 0.

Adapun estimasi model pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Provinsi Jambi dituliskan sebagai berikut:

$$PE_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 KKD_{it} + \mu_{it}$$

Dimana:

PE	: Pertumbuhan Ekonomi (%)
KKD	: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (%)
α_0	: Konstanta
α_1	: Koefisien regresi
μ_{it}	: gangguan / standar error
i	: Kabupaten/ Kota ke-i
t	: Periode waktu (2009,...,2013)

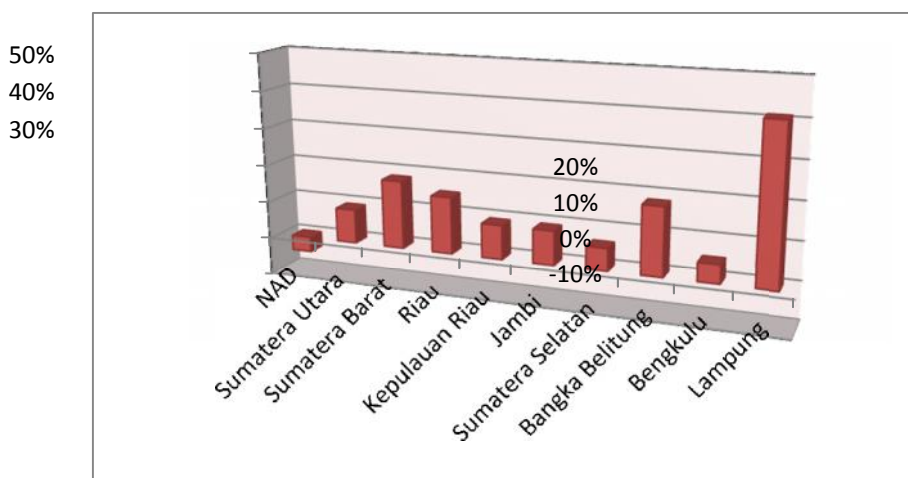
HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Belanja Modal menurut Provinsi-provinsi di Sumatera

Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah yang mencerminkan pengeluaran dalam bentuk pembelian atau pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang digunakan untuk menunjang kegiatan pemerintahan seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan aset tetap lainnya. Dengan ini perlu ada kebijakan yang cepat dan tepat dari pemerintah daerah. Agar melalui

belanja modal ini diharapkan mampu menciptakan pembangunan ekonomi yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, kemajuan daerah itu sendiri dan menjadi daerah yang mandiri agar Infrastruktur baik jalan maupun yang lainnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.

Pada Perkembangan belanja modal secara keseluruhan di Sumatera ada Beberapa Provinsi yang mengalami perkembangan yang signifikan hal ini dikarenakan pada setiap tahun, belanja modal nya mengalami peningkatan yang cukup baik dari tahun ketahun, namun ada juga beberapa Provinsi yang mengalami peningkatan di tahun tertentu namun di tahun berikutnya mengalami penurunan. Perkembangan masing-masing Provinsi di Sumatera terlihat di bawah ini pada (Gambar 1).



Gambar. 1. Perkembangan Belanja Modal provinsi-provinsi di Sumatera

Perkembangan belanja modal tertinggi yaitu Provinsi Lampung sebesar 41% walaupun rata-rata belanja modal nya di bawah Provinsi lain namun setiap tahun nya belanja modal Provinsi Lampung mengalami Peningkatan. Selanjutnya Provinsi Peningkatan sebesar 18% terjadi pada Provinsi Sumatera Barat, dan Provinsi Bangka Belitung. Selanjutnya peningkatan ini diikuti oleh Provinsi Riau dengan Perkembangan sebesar 15%. Provinsi Jambi, Provinsi Kepulauan Riau dan Sumatera Utara masing-masing mengalami perkembangan sebesar 9%. Dan Provinsi Sumatera Selatan sebesar 6% . Bengkulu 5%. Dan selanjutnya yang terakhir mengalami yang mengalami perkembangan dengan -4% yaitu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Hal ini terjadi karena Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada setiap tahun belanja modal nya mengalami penurunan.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi provinsi-provinsi di Sumatera

Estimasi model pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Sumatera diberikan sebagai berikut:

PEit	=	3.410580 + 0.173387 BMIT
t stat	=	(0.660692) (0.450049)
Prob.	=	(0.5127) (0.6552)

Nilai koefisien regresi variabel belanja modal (DDF) mempunyai tanda positif dengan besaran 0.173387. Nilai t hitung variabel DDF adalah 0.450049 dengan probabilitas 0.6552. Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa belanja modal tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Sumatera. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Kurniawan (2011) yang menemukan bahwa belanja modal kabupaten/kota di Jawa Barat pada Tahun 2004 – 2010 tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Tidak signifikannya pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi pada provinsi-provinsi di Sumatera menunjukkan juga bahwa kurang tepatnya pengalokasian belanja modal tersebut. Kebijakan pengeluaran belanja modal dalam bentuk pembelian barang dan jasa, ternyata tidak mampu mendorong peningkatan permintaan produksi dalam perekonomian provinsi-provinsi di Sumatera.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pada provinsi-provinsi di Sumatera, laju perkembangan belanja modal tertinggi diperoleh Provinsi Lampung sebesar 41%. diikuti oleh Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bangka Belitung masing-masing sebesar 18%. Sedangkan perkembangan belanja modal terendah diperoleh Provinsi Aceh sebesar -4%
2. Belanja modal tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Sumatera. Ini menunjukkan masih kurang tepatnya kebijakan pengalokasian belanja modal sehingga tidak mampu mendorong peningkatan permintaan produksi daerah.

Saran

Perlu adanya kebijakan pemerintah daerah dalam menyusun anggaran belanja yang lebih memperhatikan dampaknya secara langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengadaan fasilitas umum yang memadai, pembangunan infrastruktur secara merata guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah dengan peningkatan jumlah belanja modal dari tahun ketahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, 2008. *Pengalokasian Belanja Fisik dalam Anggaran Pemerintah Daerah*.
Adam Smith, *Teori Pertumbuhan Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan*. PT. Raja Grafindo Pustaka. Jakarta.
- Alexiou Constantinous. 2009. *Government Spending and Economic Growth : Econometric Evidence from the South Eastern Europe (SSE)*. Journal of Economic and Social Research 11 (1) : 1-16.
- Arsyad Lincoln (2004), *Ekonomi Pembangunan*, Bagian Penerbitan STIE– YKPN, Yogyakarta
- Badan Pusat Statistik (BPS), *Pembangunan Dalam Angka*. Berbagai Tahun Penerbit
Badan Pusat Statistik (BPS), *Statistik Keuangan Pemerintah*. Berbagai Tahun Penerbit
- Bastian, I, 2006 *Sistim Perencanaan dan Penganggaran Pemerintahan di Daerah di Indonesia*..:Salemba Jakarta
- Boediono, 1999, *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, Yogyakarta: BPFE Dumairy. (2002). *Perekonomian Indonesia*. Penerbit : Erlangga, Jakarta

- Dirjen Keuangan Perimbangan Kementrian Keuangan Republik Indonesia, <http://www.djpk.depkeu.go.id/> .
- Editorial Media Indonesia. *Menggenjot Belanja Modal*. 25 Agustus 2008.
- Gujarati, Damodar. 2000. *Ekonometrika Dasar*. Penerjemah : Sumarno Zain. Erlangga, Jakarta
- Halim, Abdul. 2007. Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, Edisi Revisi, UPP AMP YKPN, Yogyakarta
- Jhingan, 2002. *Definisi dari penanaman modal asing*. *Jurnal Makro Ekonomi*. Jakarta.
- Mangkusubroto, Guritno, 1995. *Ekonomi Publik*, PBFU UGM, Yogyakarta.
- Junaidi, J; Zulgani, Z. (2011). Peranan Sumberdaya Ekonomi dalam Pembangunan Ekonomi Daerah. *Jurnal Pembangunan Daerah*, Edisi 3, 27-33
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Rahayu Tri. 2004. *Peranan Sektor Publik Lokal Dalam Pertumbuhan Ekonomi Regional di Wilayah Surakarta*. *Jurnal Kinerja* Vol. VIII :133-147. Rasdianto, 2013. *Akutansi Keuangan Daerah Berbasis Actual*. Medan
- Rostow dan Musgrave, 1996. *Pembangunan Ekonomi. Ekonomi Perencanaan Pembangunan*. PT. Raja Grafindo Pustaka, Jakarta.
- Sadono Sukirno, 2006, *Ekonomi Pembangunan Proses masalah dan Dasar Kebijakan*, cetakan ketiga, Penerbit Kencana, Jakarta.
- Sodik, Jamzani. 2007. *Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Regional (Studi Kasus Data Panel di Inonesia)*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 12 No. 1, April 2007.
- Straub, Stéphane. 2008. *Infrastructure and Growth in Developing Countries: Recent Advances and Research Challenges. Working Paper. Development Research Department. Research Support Team. World Bank*.
- Suparmoko, M., 2002. *Ekonometrika Pembangunan*. BPFE, Jakarta
- Suryana, 2000. *Ekonomi Pembangunan*. Penerbit : Salemba, Jakarta
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Utama, Suyana. 2009. *Aplikasi Analisis Kuantitatif*. Denpasar : Sastra Utama.